

BAB II

PERKEMBANGAN KOTA SUKABUMI

2.1. Peran dan Fungsi Kota Sukabumi Dalam Perspektif Jawa Barat

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 telah ditetapkan 111 (seratus sebelas) kawasan andalan di seluruh wilayah Indonesia sebagai pusat kegiatan yang berdimensi nasional. Tujuh diantaranya berada di Propinsi Jawa Barat termasuk Kota Sukabumi sebagai salah satu simpul pelayanan utama, dengan sektor unggulan kawasan andalan Sukabumi yaitu: Pertanian/Agrobisnis, Pariwisata, Perikanan, Perkebunan, Jasa dan Pedagangan dan untuk kawasan Kota Sukabumi lebih ditekankan pada pengembangan kawasan kota.

Mengacu kepada kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Barat (RTRWP), maka kebijakan spasial (keruangan) wilayah Kota Sukabumi berpedoman pada kebijakan RTRW Kota Sukabumi Tahun 2002-2011. Dalam RTRW ini kedudukan dan peran Kota Sukabumi pada lingkup nasional dan regionalnya adalah sebagai berikut:

1. Dalam RTRW Nasional sebagai salah satu kawasan andalan untuk wilayah Propinsi Jawa Barat yang disebut dengan kawasan andalan Sukabumi dan sekitarnya.
2. Kota Sukabumi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) bersama Cianjur yang diarahkan sebagai salah satu pusat keluar masuknya aliran orang dan barang dari dan ke daerah sekitarnya.
3. Dalam sistem perkotaan Jawa Barat Kota Sukabumi ditetapkan sebagai kota hierarki IIIA yang memiliki fungsi dan peran yaitu:
 - a. Pusat produksi, koleksi dan distribusi dengan skala pelayanan inter regional
 - b. Memiliki intensitas kegiatan ekonomi yang tinggi.

2.2. Perkembangan Makro Sosial - Ekonomi

2.2.1. Indikator Makro Sosial

Perkembangan penduduk di Kota Sukabumi selama lima tahun terakhir terus meningkat, dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata 1,75 persen selama periode 1998-2002, berdasarkan rekapitulasi registrasi penduduk Tahun 1998 jumlah penduduk Kota Sukabumi sebesar 241.396 jiwa, Tahun 1999 sebanyak 242.976 jiwa, Tahun 2000 sebanyak 252.420 jiwa, Tahun 2001 sebanyak 257.097 jiwa dan pada Tahun 2002 sebanyak 259.045 jiwa.

Berdasarkan keadaan tersebut di atas maka pada Tahun 2008, penduduk Kota Sukabumi diperkirakan sebanyak 287.462 jiwa, sedangkan selama periode 2004 - 2008, diperkirakan masing-masing sebanyak 268.191 jiwa, 272.884 jiwa, 277.659 jiwa, 282.518 jiwa dan 287.462 jiwa.

Salah satu tolok ukur makro untuk mengukur keberhasilan pembangunan di bidang sosial adalah Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Harapan Hidup (AHH). Selama kurun waktu tiga tahun, yaitu mulai dari Tahun 1999 sampai Tahun 2001, AKB di Kota Sukabumi menunjukkan penurunan dan sekaligus menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat Kota Sukabumi mengalami peningkatan. Apabila pada Tahun 1999, angka kematian bayi per seribu kelahiran mencapai 41,36, maka pada Tahun 2000 hanya sebesar 41,00 dan turun lagi menjadi 40,78 pada Tahun 2001. Pada Tahun 2008, AKB diharapkan menurun menjadi 14,9 kematian bayi per seribu kelahiran, demikian pula dengan Angka Harapan Hidup (AHH) yang bertambah panjang menjadi 3,68 tahun selama periode 1999-2001. Hal ini mengindikasikan bahwa derajat kesehatan masyarakat kualitas fisik penduduk Kota Sukabumi telah meningkat. Pada Tahun 1999 AHH penduduk Kota Sukabumi mencapai 68,38 tahun, dan pada Tahun 2000 mencapai 68,18 tahun, Tahun 2001 menjadi 68,21 tahun dan pada Tahun 2002 meningkat lagi menjadi 69,23

tahun, sehingga pada Tahun 2008 AHH penduduk Kota Sukabumi diproyeksikan akan mencapai 71,46 tahun atau bertambah panjang 3,25 tahun dibandingkan dengan Tahun 2001.

Indikator lain untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari hasil pendidikan yang telah/ sedang dicapai oleh penduduk, karena pendidikan merupakan usaha manusia untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan, menuju masyarakat dewasa dan mandiri. Ukuran yang sangat mendasar dari tingkat pendidikan pada tingkat makro adalah kemampuan baca tulis penduduk dewasa, sampai Tahun 2001 penduduk Kota Sukabumi secara keseluruhan masih belum terbebas dari buta huruf, walaupun dalam persentase yang relatif kecil tetapi masih ada penduduk yang tidak bisa membaca dan menulis. Pada Tahun 1999 tercatat Angka Melek Huruf (AMH) sebesar 97,72 persen penduduk yang dapat membaca dan menulis, angka tersebut pada Tahun 2000 meningkat menjadi 98,64 persen, Tahun 2001 meningkat mencapai 98,80 persen, selanjutnya pada Tahun 2002 mencapai 99,04 persen. Keadaan ini menunjukkan bahwa pada Tahun 1999 masih terdapat 2,28 persen penduduk usia 15 tahun ke atas yang buta Huruf, Tahun 2000 sebesar 1,36 persen, Tahun 2001 sebesar 1,20 persen dan pada tahun 2002 mencapai 0,96 persen, sehingga diharapkan sebelum Tahun 2008 penduduk Kota Sukabumi sudah terbebas dari buta huruf dengan AMH mencapai 100 persen pada Tahun 2005.

2.2.2. Indikator Makro Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan/atau laju pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu pendekatan atau indikator ekonomi makro suatu negara atau daerah. Adanya kenaikan dari laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, menggrafikkan bahwa pembangunan ekonomi di wilayah tersebut sedang membaik dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Dengan perkataan

lain meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung menunjukkan bahwa tingkat kehidupan ekonomi atau taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat suatu wilayah bertambah baik yang ditunjukkan dengan meningkatnya pendapatan perkapita.

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Sukabumi dari Tahun 1998 sampai dengan Tahun 2002, baik PDRB atas dasar harga berlaku maupun PDRB atas dasar harga konstan 1993 disajikan dalam Tabel II.1, II.2 dan II.3. Berdasarkan kelompok sektor, dapat dikemukakan bahwa dari tiga sektor pembentuk PDRB, sektor primer (pertanian, pertambangan, penggalian) merupakan sektor yang cukup parah terkena dampak krisis ekonomi yang melanda perekonomian nasional pada pertengahan tahun 1997 dibandingkan dengan dua sektor lainnya, yaitu sektor sekunder (industri pengolahan, listrik dan bangunan) dan sektor tersier (perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi serta keuangan, jasa dan perusahaan). Sektor primer secara rata-rata tumbuh sebesar 6,83 persen selama periode 1998-2002, sementara sektor sekunder dan sektor tersier tumbuh dengan rata-rata sebesar 16,54 persen dan 15,18 persen. Positifnya laju pertumbuhan sektor primer, karena pada tahun 2002 mengalami pertumbuhan yang cukup fantastis, yaitu sebesar 48,00 persen.

Tabel II.1
PDRB & LPE Menurut Kelompok Sektor
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 1998 - 2002

(Miliar Rp.)

| No. | Kelompok Sektor | 1998 | | 1999 | | 2000 | | 2001 | | 2002 | |
|-----|-----------------|---------|----------|---------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| | | (Rp) | r persen | (Rp) | r persen | Juta (Rp) | r persen | Juta (Rp) | r persen | Juta (Rp) | r persen |
| 1 | Sektor Primer | 49,138 | (18,94) | 38,687 | (21,27) | 41,696 | 7,78 | 49,441 | 18,57 | 73,173 | 48,00 |
| 2 | Sektor Sekunder | 84,994 | 13,96 | 99,026 | 17,31 | 121,110 | 22,30 | 132,990 | 9,81 | 158,675 | 19,31 |
| 3 | Sektor Tersier | 717,935 | 23,77 | 793,269 | 10,49 | 874,879 | 10,29 | 1,029,921 | 17,72 | 1170,436 | 13,64 |
| | PDRB | 851,448 | 16,87 | 930,983 | 9,34 | 1,037,686 | 11,46 | 1,212,354 | 16,83 | 1402,264 | 15,66 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Sukabumi, 2002.

Tabel II.2
PDRB dan LPE Menurut Kelompok Sektor
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1998 - 2002

(Miliar Rp.)

| No. | Kelompok Sektor | 1998 | | 1999 | | 2000 | | 2001 | | 2002 | |
|-----|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|--------------|
| | | Rp. | r persen | Rp. | r persen | Rp. | r persen | Rp. | r persen | Rp. | r persen |
| 1 | Sektor primer | 19,138 | (56,02) | 13,407 | (30,84) | 14,549 | 8,52 | 13,888 | (4,54) | 16,223 | 16,81 |
| 2 | Sektor Sekunder | 49,079 | (22,77) | 49,070 | (0,02) | 56,605 | 15,36 | 59,443 | 5,01 | 63,291 | 6,47 |
| 3 | Sektor Tersier | 374,541 | (12,30) | 394,691 | 5,38 | 408,035 | 3,38 | 429,892 | 5,36 | 449,86 | 4,65 |
| | PDRB | 443,006 | (17,15) | 457,169 | 3,20 | 479,190 | 4,82 | 503,224 | 5,02 | 529,374 | 5,196 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Sukabumi, 2002.

Apabila memperhatikan peranan ketiga sektor pembentuk PDRB Kota Sukabumi selama periode 1998-2002, maka sektor yang perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius adalah sektor tersier, karena sektor ini merupakan sektor lokomotif atau *leading sector* perekonomian Kota Sukabumi. Menurut harga berlaku selama periode 1998-2002 sektor tersier memberikan kontribusi pada pembentukkan PDRB Kota Sukabumi sebesar 84,45 persen seperti terlihat dalam Tabel II. 3 berikut ini.

Tabel II.3**Struktur Ekonomi Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 1998 - 2002**

(Persen)

| No. | Kelompok | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | Rata-rata |
|-----|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. | Sektor Primer | 5,77 | 4,16 | 4,02 | 4,08 | 5,22 | 4,65 |
| 2. | Sektor Sekunder | 9,91 | 10,64 | 11,67 | 10,97 | 11,32 | 10,90 |
| 3. | Sektor Tersier | 84,32 | 85,20 | 84,31 | 84,95 | 83,47 | 84,45 |
| | a. Perdag, Hotel & Rest | 46,32 | 44,51 | 45,19 | 45,77 | 46,30 | 45,62 |
| | b. Pengangkutan & Kom | 15,17 | 15,74 | 15,82 | 14,99 | 14,42 | 15,23 |
| | c. Keuangan, jasa & Perus dan Persewaan | 8,01 | 9,16 | 6,62 | 7,22 | 6,81 | 7,56 |
| | d. Jasa-jasa | 14,74 | 15,80 | 16,68 | 16,97 | 15,93 | 16,02 |
| | PDRB | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Sukabumi, 2002

Lebih lanjut selama periode 1998-2002 (kecuali tahun 1998), sektor primer cenderung di bawah nilai trend atau nilai PDRB sektor primer yang direncanakan. Hal ini dapat dilihat dari nilai fluktuasi PDRB sektor primer selama periode tersebut bertanda negatif, walaupun secara

rata-rata masih positif, yaitu sebesar 0,42 persen (menurut harga berlaku) dan 0,02 persen menurut harga konstan (lihat Tabel II.4). Hal yang sama juga terjadi pada sektor sekunder, khusus untuk sektor tersier menurut harga berlaku nilai fluktuasinya (positif/negatif) berada di bawah 5 persen, dan secara rata-rata juga positif sebagaimana yang terjadi pada sektor primer dan sektor sekunder yaitu sebesar 0,07 persen, akan tetapi menurut harga konstan berfluktuasi di atas 15 persen. Fluktuasi negatif yang paling besar dalam sektor tersier adalah terjadi pada Tahun 2002 dengan nilai sebesar -78,12 persen dan fluktuasi positif terbesar terjadi pada Tahun 2001 (60,38). Secara rata-rata, menurut harga konstan, sektor tersier berada di bawah nilai yang direncanakan yang ditandai dengan negatifnya nilai fluktuasi secara rata-rata sektor tersebut, yaitu -2,30 persen.

Tabel II.4
Nilai Fluktuasi PDRB Menurut Kelompok Sektor
Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 1998 - 2002

(Persen)

| Tahun | Kelompok Sektor | | | | Kelompok Sektor | | | |
|------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|
| | Sektor Primer | Sektor Sekunder | Sektor Tersier | PDRB Harga Berlaku | Sektor Primer | Sektor Sekunder | Sektor Tersier | PDRB Harga Konstan |
| 1998 | 27,10 | 2,29 | 4,21 | 5,07 | 15,91 | 2,81 | -17,72 | 1,00 |
| 1999 | -13,15 | -2,17 | -1,23 | -1,86 | -16,08 | -4,94 | 0,48 | -0,73 |
| 2000 | -17,31 | 1,47 | -4,62 | -4,53 | -5,78 | 2,99 | 23,49 | -0,66 |
| 2001 | -12,20 | -3,27 | -0,15 | -1,05 | -6,83 | 0,11 | 60,38 | -0,21 |
| 2002 | 17,66 | 1,96 | 2,17 | 2,84 | 12,89 | 0,05 | -78,12 | 0,61 |
| Rata-Rata | 0,42 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,02 | 0,01 | -2,30 | 0,00 |

Sumber: Tabel 1 dan Tabel II, diolah.

Indikasi tersebut di atas sekaligus menunjukkan bahwa nilai hasil bagi lokasi (*Location Quotient* = LQ) untuk sektor tersier adalah berada di atas 1, khususnya untuk sub sektor perdagangan besar dan eceran, subsektor hotel dan subsektor restoran (untuk sektor perdagangan, hotel dan restoran), subsektor pengangkutan, khususnya angkutan jalan raya, jasa penunjang angkutan dan sub sektor komunikasi (untuk sektor pengangkutan dan komunikasi), subsektor bank, subsektor

lembaga keuangan tanpa bank dan jasa penunjang keuangan, subsektor sewa bangunan dan subsektor jasa perusahaan (untuk sektor keuangan, persewaan bangunan dan jasa perusahaan) serta subsektor pemerintahan umum dan subsektor swasta, khususnya untuk sosial kemasyarakatan hiburan dan rekreasi untuk sektor jasa-jasa [lihat Tabel II.5]. Sementara itu, dalam sektor primer, yang mempunyai nilai LQ di atas 1, hanya untuk subsektor peternakan (sektor pertanian) dan untuk sekunder hanya subsektor air bersih (sektor listrik, gas dan air bersih) dan sektor bangunan. Fenomena penemuan empiris tersebut apabila dihubungkan dengan keadaan atau situasi perekonomian dalam cakupan yang lebih besar (dilihat dari nilai Indeks Total Keunggulan Daerah (ITKD) Kota Sukabumi, yaitu dalam lingkup Propinsi Jawa Barat), maka sektor-sektor yang mempunyai nilai LQ lebih dari satu tersebut merupakan sektor-sektor yang kemungkinan dapat bersaing dengan sektor-sektor yang sama dengan kabupaten/kota yang ada dalam cakupan propinsi Jawa Barat.

Kecenderungan perkembangan dari PDRB Kota Sukabumi secara keseluruhan serta dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian secara nasional seperti adanya kebijaksanaan Pemerintah Pusat pada Tahun 2004 yang akan melepaskan diri dari pinjaman dana bantuan luar negeri yaitu dengan *International Monetary Fund* (IMF), kenaikan harga bahan bakar minyak dan tarif telepon, maka proyeksi laju pertumbuhan ekonomi Kota Sukabumi untuk periode 2004-2008 diperkirakan tidak akan berbeda jauh dengan periode-periode sebelumnya (Tahun 2002). Hal ini berarti bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kota Sukabumi hanya akan mengalami penambahan antara 0,20 - 0,30 per tahun. Adanya pemberian silang atau interval tersebut karena harus disadari bahwa angka atau nilai proyeksi adalah bukan nilai mutlak yang mesti terpenuhi, suatu proyeksi yang ideal apabila nilai tersebut cenderung berada di bawah nilai rencana atau trend. Syarat ini, berdasarkan grafik II.1 adalah terpenuhi, dengan angka proyeksi laju

pertumbuhan tersebut, maka besarnya proyeksi nilai PDRB Kota Sukabumi selama periode 2004 - 2008 adalah sebagaimana disajikan dalam Tabel II.6.

Tabel II.5
Analisis LQ dan Indeks Total Keunggulan Daerah

| Sektor | Nilai Rata-Rata LQ Kota Sukabumi | Rata-Rata ITKD Kota Sukabumi |
|--|----------------------------------|------------------------------|
| PERTANIAN | | |
| a. Tanaman Bahan Makanan | | |
| b. Tanaman Perkebunan | | |
| c. Peternakan | 1.1503 | 0.1535 |
| d. Kehutanan | | |
| e. Perikanan | | |
| PERTAMBANGAN | | |
| a. Minyak dan Gas Bumi | | |
| b. Pertambangan tanpa Minyak Bumi | | |
| c. Penggalian | | 0.7048 |
| INDUSTRI PENGOLAHAN | | 0.1312 |
| a. Industri Migas | | |
| 1. Penggalian Minyak Bumi | | |
| 2. Gas Alam Cair | | |
| b. Industri tanpa Migas | | 0.1219 |
| LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH | | 0.2021 |
| a. Listrik | | 0.5190 |
| b. Gas | | |
| c. Air Bersih | 1.8672 | |
| BANGUNAN | 1.7668 | 0.3646 |
| PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN | 2.6923 | 0.3712 |
| a. Perdagangan Besar dan Eceran | 3.1956 | 0.3939 |
| b. Hotel | 2.2197 | 0.1912 |
| c. Restoran | | 0.2010 |
| PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI | 2.5019 | 0.2165 |
| a. Pengangkutan | 2.5674 | 0.2325 |
| 1. Angkutan Rel | | 0.4700 |
| 2. Angkutan Jalan Raya | 2.9772 | 0.1026 |
| 3. Angkutan Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan | | |
| 4. Angkutan Udara | | |
| 5. Jasa Penunjang Angkutan | 4.6929 | 0.4187 |
| b. Komunikasi | 2.2282 | 0.1520 |
| KEUANGAN, PERSEWAAN BANGUNAN DAN JASA PERUSAHAAN | 1.8178 | |
| a. Bank | 7.8700 | |
| b. Lembaga Keuangan tanpa Bank dan Jasa Penunjang Keuangan | 2.3525 | |
| c. Sewa Bangunan | 1.1498 | 0.2824 |
| d. Jasa Perusahaan | 2.9177 | 0.0580 |
| JASA-JASA | 1.8267 | 0.1723 |
| a. Pemerintahan Umum | 2.0769 | 0.1584 |
| b. Swasta | 1.5083 | 0.1926 |
| 1. Sosial Kemasyarakatan | 3.3938 | 0.2887 |
| 2. Hiburan dan Rekreasi | 4.4201 | |
| 3. Perorangan dan Rumah Tangga | | 0.1770 |
| PDRB Menurut Harga Kosntan | | 0.1436 |

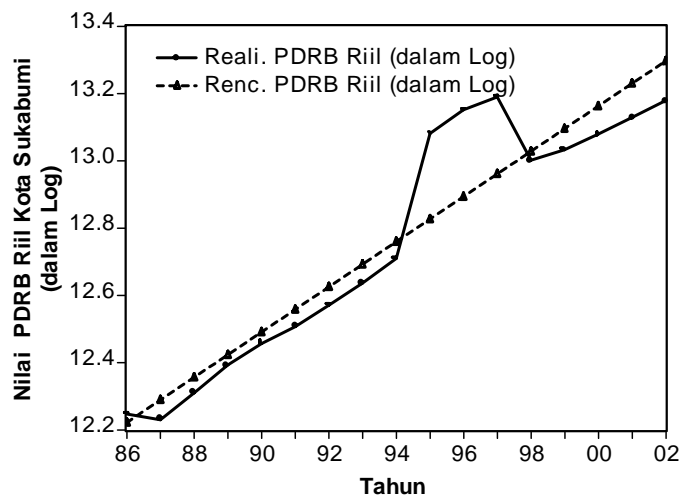
Keterangan: Sektor atau subsektor yang kosong nilainya, menunjukkan bahwa sektor tersebut tidak unggul dan tidak prospek untuk dikembangkan.

Sumber: Lihat Tabel 1 dan Tabel II, diolah.

Tabel II.6
Nilai Proyeksi PDRB Menurut Harga Riil/Konstan dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Sukabumi Tahun 2004-2008

| Tahun | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| Nilai Proyeksi PDRB Menurut Harga Riil/konstan (miliar Rp.) | 559.895 | 593.121 | 630.191 | 671.154 | 716.188 |
| Laju Pertumbuhan Ekonomi (persen) | 5,70 | 6,00 | 6,30 | 6,50 | 6,71 |

Grafik II.1
Perkembangan Realiasi dan Rencana PDRB Menurut Harga Konstan/Riil Kota Sukabumi [dalam Logaritma Natural (Log)]



Pendapatan per kapita penduduk didekati melalui pendekatan PDRB per kapita, walaupun belum secara keseluruhan dapat mencerminkan pendapatan seluruh masyarakat akan tetapi dapat dijadikan grafikan makro pendapatan rata-rata yang diterima oleh masyarakat pada suatu periode tertentu. Untuk lebih jelasnya grafikan perkembangan PDRB perkapita atau pendapatan perkapita Kota Sukabumi, selengkapnya disajikan dalam Tabel II.7 berikut ini.

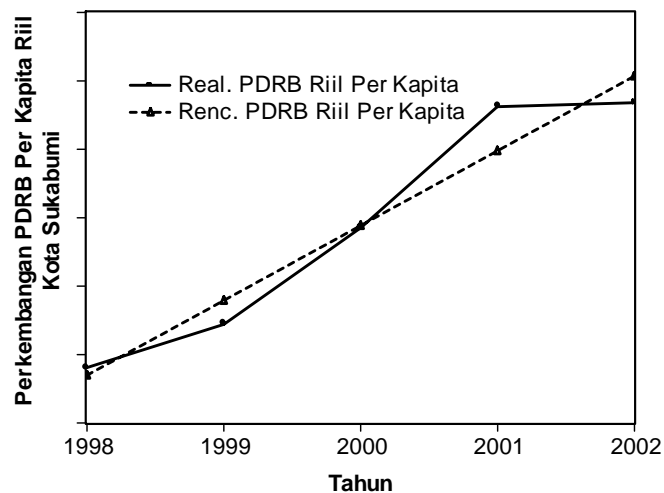
Tabel II.7
PDRB Perkapita Kota Sukabumi Tahun 1998 - 2002

(Rupiah)

| No. | PDRB Perkapita | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | Rata-Rata |
|-----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1. | PDRB Perkapita atas Dasar Harga Berlaku | 3.504.672 | 3.760.302 | 4.113.020 | 4.740.814 | 5.218.831 | 5.218.831 |
| 2. | PDRB Perkapita atas Dasar Harga Konstan | 1.823.238 | 1.846.536 | 1.899.340 | 1.967.819 | 1.970.156 | 1.970.156 |
| 3. | Pertumbuhan PDRB Perkapita Berlaku | - | 7,29 | 9,38 | 15,26 | 10,08 | 10,51 |
| 4. | Pertumbuhan PDRB Perkapita Riil | - | 1,28 | 2,86 | 3,61 | 0,12 | 1,97 |
| 5. | Fluktuasi PDRB Perkapita Berlaku | 0,13 | -0,09 | -0,17 | 0,09 | 0,04 | 0,00 |
| 6. | Fluktuasi PDRB Perkapita Riil | 0,02 | -0,05 | 0,00 | 0,09 | -0,05 | 0,00 |

Sumber: Statistik Kota Sukabumi, Tahun 2002, diolah.

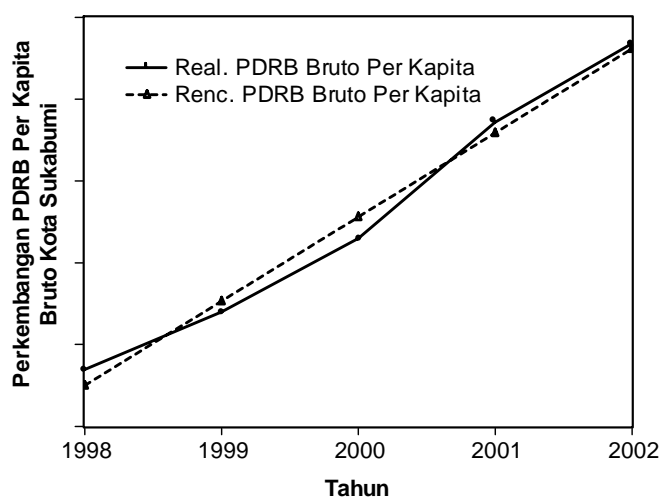
Grafik II.2
Perkembangan Realiasi dan Rencana Pendapatan Perkapita Riil Kota Sukabumi Tahun 1998-2002



Pendapatan per kapita baik atas dasar harga berlaku dan harga konstan 1993 menunjukkan peningkatan, selama empat tahun terakhir pendapatan per kapita menurut harga berlaku tumbuh dengan rata-rata 10,51 persen, sementara menurut harga konstan 1,97 persen. Lebih lanjut, selama periode Tahun 1998-2002 pendapatan per kapita menunjukkan pola perkembangan yang tidak stabil (naik-turun), akan nilai fluktuasi atau kemiringannya adalah mendekati nol (lihat grafik II.2), dengan rata-rata fluktuasi sama dengan nol. Keadaan ini menunjukkan bahwa perkembangan pendapatan perkapita tidak akan berbeda jauh dengan Pemerintah Kota Sukabumi

periode-periode sebelumnya. Oleh karena itu, walaupun pada Tahun 2002, laju pertumbuhan pendapatan per kapita riil Kota Sukabumi adalah 0,12 persen dan 10,08 menurut harga berlaku atau bruto, akan tetapi dapat diproyeksikan bahwa pada Tahun 2008, pendapatan per kapita riil diperkirakan akan tumbuh antara 4,25 persen sampai 4,50 persen dan antara 12,00 persen sampai 13,01 persen menurut harga berlaku dibandingkan dengan Tahun 2002, dengan syarat laju pertumbuhan penduduk antara 2004-2008, rata-rata sebesar 1,00 persen sampai dengan 1,25 persen. Dengan demikian, pada tahun 2008, pendapatan per kapita riil Kota Sukabumi adalah sebesar 2.405.013 rupiah dan 8.637.088 rupiah menurut harga berlaku.

Grafik II.3
Perkembangan Realiasi dan Rencana Pendapatan Per Kapita Menurut Harga Berlaku atau Bruto Kota Sukabumi, 1998-2002



Tabel II.8.
Nilai Proyeksi dan Laju Pertumbuhan PDRB Per Kapita Menurut Harga Riil Kota Sukabumi, 2004-2008

| Tahun | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nilai Proyeksi PDRB Per Kapita Menurut Harga Riil (Rp.) | 2.048.962 | 2.132.970 | 2.223.621 | 2.301.448 | 2.405.013 |
| Laju Pertumbuhan PDRB Per Kapita Riil (persen) | 4,00 | 4,10 | 4,25 | 4,35 | 4,50 |

Tabel II.9
Nilai Proyeksi dan Laju Pertumbuhan PDRB Per Kapita Menurut Harga Berlaku
Kota Sukabumi, 2004-2008

| Tahun | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nilai Proyeksi PDRB Per Kapita Menurut Harga Berlaku (Rp.) | 5.645.209 | 6.221.585 | 6.873.608 | 7.642.764 | 8.637.088 |
| Laju Pertumbuhan PDRB Per Kapita Menurut Harga Berlaku (persen) | 8,17 | 10,21 | 10,48 | 11,19 | 13,01 |

2.2.3. Pendapatan Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi, Pemerintah Daerah dituntut harus lebih mandiri dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, pembangunan dan fungsi pelayanan, hal ini tentunya sangat terkait erat dengan kemampuan keuangan/pendapatan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah maupun dalam pengalokasian anggaran untuk kelangsungan penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan tersebut.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber penerimaan yang sangat penting, dituntut untuk lebih berperan kontribusinya dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah, karena di sisi lain sumber penerimaan dari dana perimbangan dan lain-lain penerimaan yang sah tidak dapat diketahui secara pasti proporsi penerimaan untuk daerah. Oleh karena itu, kreativitas Pemerintah Daerah dalam menggalang potensi PAD harus terus ditingkatkan.

Realisasi PAD Kota Sukabumi selama Tahun 1998-2002 menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat, kecuali pada Tahun 1999/2000 seiring dengan ditetapkannya UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Namun, apabila melihat besarnya kontribusi PAD terhadap APBD tampak adanya penurunan (lihat Tabel II.10). Pada Tahun 1998/1999, kontribusi PAD pada APBD sebesar 20,25. Satu tahun berikutnya menurun menjadi 12,59 persen, kemudian kembali naik menjadi 13,56 persen pada Tahun 2000, turun kembali menjadi 10,49 persen pada Tahun 2001 dan meningkat lagi menjadi 13,10 persen pada Tahun 2002. Fenomena ini mengindikasikan bahwa: *pertama*, penerimaan

PAD Kota Sukabumi selama periode Tahun 1998/1999 sampai dengan Tahun 2002 adalah tidak stabil dan *kedua*, komposisi anggaran pendapatan masih didominasi oleh anggaran yang bersumber dari Pemerintah Pusat.

Tabel II.10
Realisasi PAD, APBD dan Persentase PAD Terhadap APBD
Kota Sukabumi Tahun 1998/1999 - 2002

(Miliar Rp)

| No | Uraian | Tahun Anggaran | | | | |
|----|------------------------------|----------------|---------|--------|---------|---------|
| | | 1998/99 | 1999/00 | 2000 | 2001 | 2002 |
| 1 | PAD | 8,316 | 8,079 | 8,337 | 12,858 | 22,774 |
| 2 | Perimbangan/ PKP | 32,226 | 47,772 | 48,787 | 118,641 | 160,220 |
| 3 | APBD | 40,539 | 64,154 | 61,508 | 122,587 | 173,900 |
| 4 | Persentase PAD terhadap APBD | 20,25 | 12,59 | 13,56 | 10,49 | 13,10 |
| 5 | Perimbangan terhadap APBD | 79,75 | 87,41 | 86,44 | 89,51 | 86,10 |

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi Tahun 2003, diolah

Fenomena sebaliknya terlihat dalam kontribusi Perimbangan Keuangan Pusat dan lain-lain penerimaan yang sah (PKP) terhadap APBD. Pada saat kontribusi PAD terhadap APBD Kota Sukabumi mengalami peningkatan, maka kontribusi PKP terhadap APBD, akan menurun. Begitu pula sebaliknya, ketika kontribusi PAD terhadap APBD Kota Sukabumi mengalami penurunan, maka kontribusi PKP terhadap APBD, akan meningkat (lihat kembali Tabel II.10).

Pada Tahun 1998/1999, besarnya kontribusi PKP pada APBD sebesar 79,75. Kontribusi ini pada satu tahun berikutnya kembali naik menjadi 87,41 persen, akan tetapi pada Tahun 2000 mengalami penurunan, sehingga kontribusi PKP terhadap APBD Kota Sukabumi hanya sebesar 86,44 persen. Pada Tahun 2001, kontribusi PKP terhadap APBD Kota Sukabumi adalah 89,51 persen atau meningkat sebesar 3,07 persen dibandingkan kontribusi pada Tahun 2000 serta pada Tahun 2002 kembali mengalami penurunan sebesar 3,41 persen dibandingkan dengan Tahun 2001. Penemuan ini apabila dikaji lebih lanjut, maka tak dapat dipungkiri bahwa tingkat ketergantungan Pemerintah Kota Sukabumi terhadap dana perimbangan keuangan pusat dan lain-lain penerimaan

yang sah masih sangat tinggi, sehingga di masa-masa mendatang salah satu tugas utama Pemerintah Kota Sukabumi adalah bagaimana meningkatkan kemandirian keuangan Kota Sukabumi, sehingga proses pembangunan yang berkesinambungan dapat lebih terjamin.

Dilihat dari sisi laju pertumbuhannya, nilai realisasi PAD Kota Sukabumi terus menunjukkan peningkatan, setelah mengalami pertumbuhan negatif sebesar - 2,84 persen pada Tahun 1999/2000, maka pada Tahun 2000 kembali mengalami pertumbuhan positif walaupun hanya sebesar 3,18 persen, selanjutnya pada Tahun 2001 dan 2002, PAD Kota Sukabumi tumbuh dengan angka yang cukup signifikan, yaitu masing-masing sebesar 54,24 persen dan 75,68 persen melihat laju pertumbuhan tersebut, maka selama periode 1998-2002 nilai fluktuasi PAD Kota Sukabumi adalah positif sebesar 4,28 persen dan sekaligus menunjukkan bahwa secara rata-rata angka pencapaian atau realisasi PAD Kota Sukabumi selalu berada di atas nilai rencana yang telah ditetapkan.

Nilai realisasi PKP Kota Sukabumi juga terus menunjukkan peningkatan dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 57,15 persen, selama periode 1998/1999-2002 laju pertumbuhan terendah PKP terjadi pada Tahun 2000 yaitu hanya sebesar 2,12 persen, sedangkan tingkat pertumbuhan tertinggi PKP terjadi pada Tahun 2001 yaitu sebesar 143,18 persen, nilai fluktuasi rata-rata PKP Kota Sukabumi selama periode 1998/1999-2002 adalah positif sebesar 14,01 persen dan sekaligus menunjukkan bahwa secara rata-rata angka realisasi PKP Kota Sukabumi selalu berada di atas nilai rencana yang telah ditetapkan.

Perkembangan realisasi APBD Kota Sukabumi selama periode 1998/1999-2002, APBD Kota Sukabumi tumbuh secara rata-rata sebesar 52,31 persen, laju pertumbuhan terendah APBD Kota Sukabumi terjadi pada Tahun 2000 yaitu hanya sebesar 2,28 persen, sedangkan tingkat

pertumbuhan tertinggi terjadi pada Tahun 2001 yaitu sebesar 130,20 persen, walaupun demikian dalam perjalanannya APBD Kota Sukabumi ternyata mengalami fluktuasi atau pasang surut, yaitu pada Tahun 1999/2000 - 2000 APBD Kota Sukabumi mengalami fluktuasi negatif, akibatnya realiasi APBD sedikit melesat dari perkiraan sebelumnya. Dalam dua periode ini besarnya nilai fluktuasi APBD Kota Sukabumi adalah masing-masing sebesar - 2,95 persen dan - 38,95 persen dari total APBD yang telah diperkirakan sebelumnya, sementara untuk periode 1998/1999 dan periode 2001-2002 APBD Kota Sukabumi berfluktuasi secara positif, yaitu masing-masing dengan nilai 88,31 persen, 1,48 persen dan 10.39 persen dari total APBD yang telah diperkirakan sebelumnya.

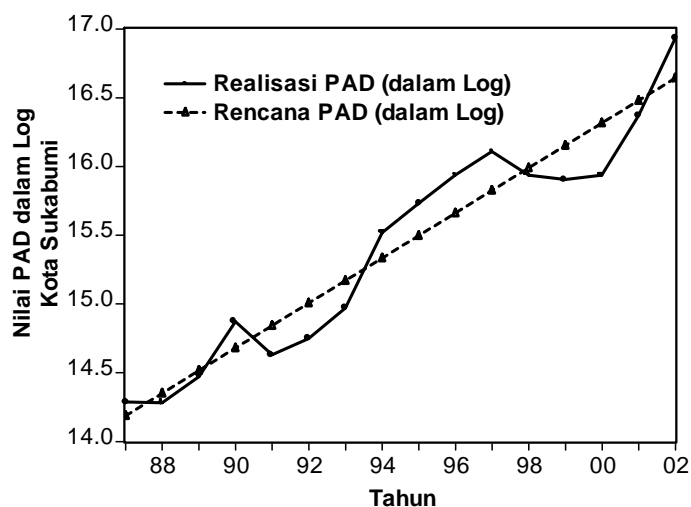
Berdasarkan kecenderungan-kecenderungan tersebut di atas selanjutnya dapat dilakukan proyeksi terhadap nilai dan laju pertumbuhan PAD, PKP dan APBD Kota untuk periode 2004-2008. Laju pertumbuhan PAD Kota Sukabumi diproyeksikan akan berkisar antara 12,25 persen sampai 14,25 persen dibandingkan dengan Tahun 2002. Dengan kata lain, pada Tahun 2008, diharapkan nilai realisasi PAD Kota Sukabumi sudah mencapai 41,591 miliar rupiah (lihat Tabel II.11). Namun demikian, besarnya nilai penetapan PAD tersebut, bukan berarti nilai proyeksi akan tercapai secara tepat, hal ini didasarkan pada ada dua alasan penting. *Pertama*, dibatalkannya Peraturan Daerah (Perda) tentang Retribusi Kebersihan Pemeliharaan Jalan mulai tahun 2004 yang selama ini merupakan salah satu pos PAD yang cukup besar peranannya. *Kedua*, sebagaimana ditunjukkan oleh grafik II.4 berikut, nilai realisasi PAD Kota Sukabumi selama periode 1987-2002, tidak stabil serta berfluktuasi tajam.

Tabel II.11
Nilai Proyeksi dan Laju Pertumbuhan PAD
Kota Sukabumi Tahun 2004-2008

| Tahun | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Nilai Proyeksi PAD (juta Rp.) | 25.355.610 | 28.512.384 | 32.167.671 | 36.404.154 | 41.591.746 |
| Laju Pertumbuhan PAD (persen) | 12,25 | 12,45 | 12,82 | 13,17 | 14,25 |

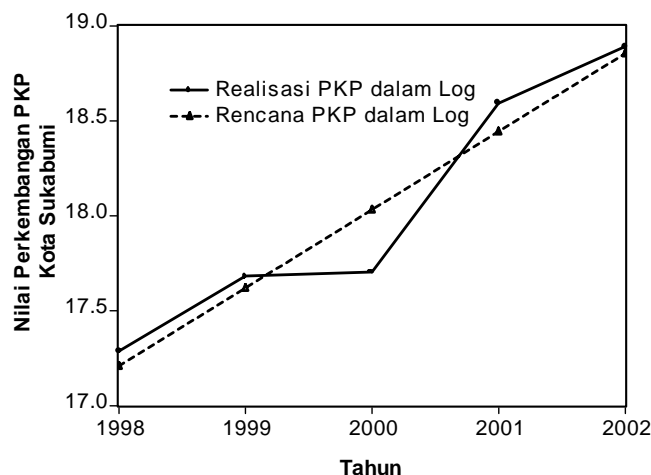
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi Tahun 2003, diolah.

Grafik II.4
Perkembangan Realiasi dan Rencana Pendapatan Asli Daerah
Kota Sukabumi, 1986/1987-2002



Laju pertumbuhan PKP Kota Sukabumi diproyeksikan akan berkisar antara 14,92 persen sampai 20,13 persen dibandingkan dengan Tahun 2002, dengan kata lain pada Tahun 2008 diharapkan nilai realisasi PKP Kota Sukabumi adalah mencapai 353,709 miliar rupiah (lihat Tabel II.12), akan tetapi karena realisasi besar-kecilnya PKP sangat tergantung pada faktor eksternal yaitu pemerintah pusat, maka kemungkinan hasil proyeksi akan meleset dari perkiraan sebelumnya, terlebih lagi adanya kekhawatiran akan situasi politik dalam negeri pada tahun-tahun mendatang, terutama menjelang pemilu Tahun 2004. Alasan lain yang dapat dikemukakan sebagaimana disinggung di atas adalah tidak stabilnya nilai realisasi dan nilai rencana dari APBD Kota Sukabumi itu sendiri selama lima tahun terakhir sebagaimana ditunjukkan dalam grafik II.5 berikut.

Grafik II.5
Perkembangan Realiasi dan Rencana PKP Kota Sukabumi, 1998/1999-2002



Tabel II.12
Nilai Proyeksi dan Laju Pertumbuhan Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Lain-Lain Penerimaan yang Sah (PKP) Kota Sukabumi, 2004-2008

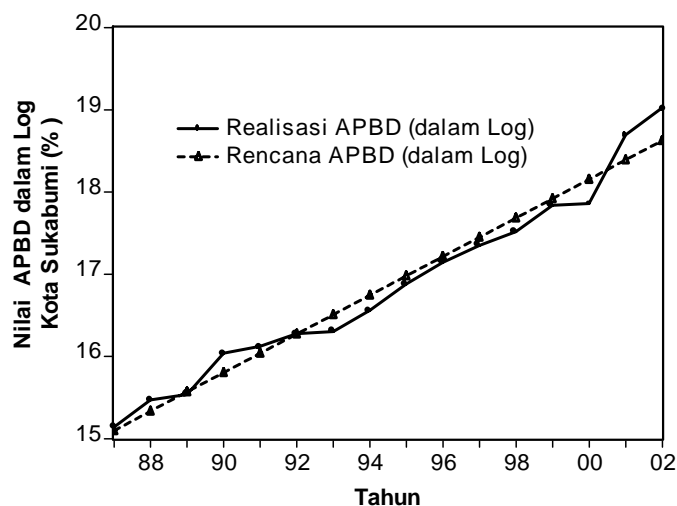
| Tahun | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nilai Proyeksi PKP (juta Rp.) | 184.125.179 | 212.443.632 | 248.282.872 | 294.438.658 | 353.709.160 |
| Laju Pertumbuhan PKP (persen) | 14,92 | 15,38 | 16,87 | 18,59 | 20,13 |

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi Tahun 2003, diolah

Laju pertumbuhan APBD Kota Sukabumi diproyeksikan berkisar antara 14,59 persen sampai 19,48 persen dibandingkan dengan Tahun 2002, sehingga pada Tahun 2008 nilai APBD Kota Sukabumi diperkirakan akan mencapai 395,264 miliar rupiah (lihat Tabel II.13), akan tetapi sebagaimana hasil proyeksi PDRB riil, PAD dan PKP Kota Sukabumi yang telah diuraikan sebelumnya, hasil proyeksi nilai APBD bukanlah merupakan nilai yang mutlak akan tercapai secara pasti, karena disamping tergantung pada faktor internal Kota Sukabumi (yaitu besar kecilnya pencapaian PAD Kota Sukabumi dalam periode waktu yang sama), juga tergantung pada faktor eksternal (yaitu besar kecilnya penerimaan PKP Kota Sukabumi dalam periode waktu yang sama). Selain itu pula, selama kurun waktu 1987/1988-2002, nilai rencana APBD dengan realisasi APBD Kota Sukabumi adalah berada di sekitar nilai rata-rata. Penemuan ini sekaligus menunjukkan bahwa perkembangan atau laju pertumbuhan APBD Kota Sukabumi untuk periode-periode mendatang

diproyeksikan akan tumbuh seperti periode-periode sebelumnya (grafik II.6).

Grafik II.6
Perkembangan Realiasi dan Rencana APBD Kota Sukabumi, 1987/1988-2002



Tabel II.13
Nilai Proyeksi dan Laju Pertumbuhan APBD Kota Sukabumi, 2004-2008

| Tahun | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nilai Proyeksi APBD (juta Rp.) | 209.480.789 | 240.956.015 | 280.450.544 | 330.810.644 | 395.264.154 |
| Laju Pertumbuhan APBD (persen) | 14,59 | 15,03 | 16,39 | 17,96 | 19,48 |

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi Tahun 2003, diolah

Tabel II.14 menunjukkan perkembangan realisasi belanja rutin atau dikenal pula dengan nama belanja aparatur daerah, dan belanja pembangunan atau belanja pelayanan publik. Selama periode 1998/1999 sampai 2002 terlihat bahwa selama periode pengamatan, belanja aparatur daerah lebih dominan dibandingkan dengan belanja pelayanan publik yaitu dengan rata-rata 68,74 persen dari total APBD Kota Sukabumi selama periode 1998/1999-2002 dan sisanya sekitar 31,26 persen merupakan kontribusi dari belanja pelayanan publik. Hal ini dipahami karena setelah pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Kota Sukabumi melakukan penataan organisasi dan personil. Dilihat dari sisi pertumbuhan belanja pelayanan publik menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat, terutama dalam periode 2000-2002, sedangkan laju pertumbuhan belanja aparatur daerah menunjukkan angka yang tidak

stabil. Laju pertumbuhan belanja pelayanan publik selama periode 1999/2000-2002 adalah masing-masing sebesar 79,60 persen, 3,34 persen, 33,69 persen dan 76,35 persen atau rata-rata sebesar 38,63 persen, sedangkan laju pertumbuhan belanja aparatur daerah dalam periode yang sama adalah masing-masing sebesar 49,08 persen, - 80,04 persen, 137,50 persen dan 30,56 persen atau rata-rata sebesar 52,27 persen.

Tabel II.14
Perkembangan Proporsi Belanja Aparatur Daerah dan Belanja Pelayanan Publik Terhadap APBD Tahun 1998-2002

(Miliar Rp.)

| No. | Uraian | Tahun Anggaran | | | | |
|-----|--|----------------|---------|--------|---------|---------|
| | | 1998/99 | 1999/00 | 2000 | 2001 | 2002 |
| 1 | Belanja Aparatur Daerah | 28,357 | 42,275 | 38,877 | 92,332 | 120,545 |
| 2 | Laju Pertumbuhan Belanja Aparatur Daerah (Persen) | | 49,08 | -8,04 | 137,50 | 30,56 |
| 3 | Belanja Pelayanan Publik | 12,182 | 21,879 | 22,631 | 30,255 | 53,355 |
| 4 | Laju Pertumbuhan Belanja Pelayanan Publik (Persen) | | 79,60 | 3,44 | 33,69 | 76,35 |
| 5 | APBD | 40,539 | 64,154 | 61,508 | 122,587 | 173,900 |
| 6 | Persen Belanja Aparatur Daerah terhadap APBD (Persen) | 69,95 | 65,90 | 63,21 | 75,32 | 69,32 |
| 7 | Persen Belanja Pelayanan Publik terhadap APBD (Persen) | 30,05 | 34,10 | 36,79 | 24,68 | 30,68 |

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi, 2003.

2.2.4. Indikator Keberhasilan

Pembangunan pada hakekatnya dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang ditandai dengan adanya peningkatan kualitas hidup penduduk yang berarti pula adanya peningkatan terhadap kualitas sumber daya manusianya. Pembangunan yang dilakukan sebagai upaya peningkatan kemampuan dasar manusia, menitikberatkan pada derajat kesehatan, pengetahuan dan keterampilan agar dapat dimanfaatkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, sosial budaya dan politik.

Tabel II.15

Proyeksi Indikator Keberhasilan Pencapaian Visi Kota Sukabumi, 2004-2008

| No. | Indikator | Satuan | Tahun Anggaran | | | | |
|-----|--|---------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 1 | Jumlah penduduk | Jiwa | 268.191 | 272.889 | 277.659 | 282.518 | 287.462 |
| 2 | Ketenagakerjaan: Bekerja Tidak bekerja | Persen | 42,64 | 44,77 | 47,00 | 49,35 | 51,82 |
| | | | 60,03 | 57,03 | 54,17 | 51,47 | 48,89 |
| 3 | Kemiskinan : KK Jiwa | | 6.181 | 4.872 | 3.537 | 2.174 | 784 |
| | | | 24.723 | 19.488 | 14.146 | 8.696 | 3.135 |
| 4 | Angka Kematian Bayi (AKB) | Perseribu kelahiran | 16,1 | 15,8 | 15,5 | 15,2 | 14,9 |
| 5 | Angka Harapan Hidup (AHH) | Tahun | 69,97 | 70,34 | 70,71 | 71,08 | 71,46 |
| 6 | Angka Melek Huruf (AMH) | Persen | 99,04 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 7 | Angka Partisipasi Kasar (APK): SD SMP SMU | Persen | 111,28 | 111,38 | 111,48 | 111,58 | 111,68 |
| | | | 122,11 | 122,21 | 122,31 | 122,41 | 122,51 |
| | | | 105,35 | 105,45 | 105,55 | 105,65 | 105,75 |
| 8 | Angka Partisipasi Murni (APM): SD SMP SMU | Persen | 89,92 | 90,42 | 90,92 | 91,42 | 91,92 |
| | | | 74,24 | 74,74 | 75,24 | 75,74 | 76,24 |
| | | | 101,12 | 101,22 | 101,32 | 101,42 | 101,52 |
| 9 | Rata-rata Lama Sekolah (RLS) | Tahun | 8,40 | 9,00 | 9,10 | 9,20 | 9,30 |
| 10 | Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) | Persen | 5,70 | 6,00 | 6,30 | 6,50 | 6,71 |
| 11 | PDRB Riil | Milyar Rp | 559.895 | 593.121 | 630.191 | 671.154 | 716.188 |
| 12 | Pendapatan Perkapita Berlaku | Juta Rp. | 5,645 | 6,222 | 6,874 | 7,643 | 8,637 |
| 13 | Daya Beli Masyarakat | Rp. | 569.700 | 580.090 | 590.650 | 601.390 | 612.340 |
| 14 | Proyeksi PAD | Milyar Rp | 25,356 | 28,512 | 32,168 | 36,404 | 41,592 |
| 15 | Proyeksi APBD | Milyar Rp | 209,481 | 240,956 | 280,450 | 330,811 | 395,264 |
| | INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) | Nilai | 76,06 | 77,13 | 78,37 | 79,23 | 80,00 |

Sumber: Dinas/Instansi, diolah.

Berdasarkan uraian di atas, Indikator Keberhasilan yang digunakan dalam rangka pencapaian Visi Kota Sukabumi akhirnya ditujukan pada peningkatan kualitas manusia atau peningkatan kinerja pembangunan manusia (lihat Tabel II.15). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Sukabumi pada Tahun 1999 telah mencapai 68,40, kemudian pada Tahun 2000 mengalami penurunan menjadi 66,80 dan pada Tahun 2001 meningkat kembali menjadi sebesar 71,51, adapun penurunan pada Tahun 2000 disebabkan karena adanya beberapa faktor yang tentunya sebagai dampak dari pasca krisis ekonomi, sosial politik yang terjadi.

Indikator keberhasilan dalam penyusunan Renstra digunakan sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi pelaksanaan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan di Kota Sukabumi selama lima tahun ke depan, dalam rangka tahap pencapaian Visi Kota Sukabumi.

2.3. Pola Belanja Daerah

Pola Belanja Daerah sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD, dikelompokkan menjadi Belanja Aparatur dan Belanja Pelayanan Publik, prioritas dari kedua belanja tersebut adalah:

- a. Normalisasi kehidupan ekonomi dan kemasyarakatan untuk memperkuat dasar bagi kehidupan perekonomian rakyat;
- b. Penganggaran atas dasar kebutuhan nyata masyarakat sesuai dengan tuntutan dan dinamika yang berkembang untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik;
- c. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana DIBALE, untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal;
- d. Peningkatan kesejahteraan pegawai secara proporsional sesuai dengan kemampuan anggaran.

Secara garis besar susunan Belanja baik Aparatur maupun Publik adalah sebagai berikut:

- a. **Belanja Administrasi Umum**, adalah kelompok belanja yang diarahkan untuk pembiayaan aktivitas administrasi dan umum yang manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran dan tidak menambah aset atau kekayaan bagi daerah. Yang termasuk dalam kelompok belanja ini ada empat jenis yaitu: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan Dinas.

- b. **Belanja operasi, pemeliharaan sarana dan prasarana publik**, adalah kelompok belanja yang diarahkan untuk membiayai aktivitas operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik yang manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran dan tidak menambah kekayaan atau aset daerah. Yang termasuk dalam kelompok belanja ini ada 4 jenis.
- c. **Belanja modal/investasi**, adalah kelompok belanja yang digunakan untuk investasi yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran sehingga menambah aset atau kekayaan daerah, dalam kelompok ini dibagi dalam dua jenis belanja yaitu: Belanja Aparatur dan Belanja Publik.
- d. **Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan**, adalah pengeluaran uang dengan tiga kriteria: tidak menerima secara langsung imbal barang dan jasa, tidak mengharapkan dibayar kembali dimasa datang seperti pinjaman dan tidak mengharapkan adanya hasil pendapatan. Dalam kelompok ini dibagi dalam beberapa jenis belanja seperti: Bantuan Kecamatan, Kelurahan, Bantuan Organisasi Sosial, Profesi dan Publik.
- e. **Belanja tidak terduga**, adalah pengeluaran yang disediakan untuk kejadian-kejadian luar biasa seperti: Bencana alam, kerusakan, pinjaman dan sebagainya.

2.4. Kendala Yang dihadapi

2.4.1 Aspek Pemerintahan dan Agama

Pemberdayaan daerah otonom merupakan upaya untuk mengoptimalkan kemampuan daerah dalam memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang dimiliki, sehingga dalam menyelenggarakan pemerintahan dapat menjadi lebih mandiri, didukung pula dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan dan kelembagaan daerah yang representatif sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan dalam mewujudkan pelayanan masyarakat. Dalam kaitan ini, salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di era otonomi daerah adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang

baik, bersih dan berwibawa (*Clean and good governance*). Oleh karena itu efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dapat tercapai apabila pemerintahan dapat menjalankan fungsi utamanya yaitu menyelenggarakan pelayanan masyarakat, menjamin ketentraman dan ketertiban serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kinerja Aparat Dan Pelayanan Kepada Masyarakat Yang Belum Optimal

Perubahan penyelenggaraan pemerintahan yang terjadi saat ini dalam pelaksanaannya tidak secara langsung diikuti oleh perubahan perilaku aparatur. Kondisi ini mengakibatkan adanya keterbatasan dalam memberikan pelayanan, tentunya berkaitan dengan spirit dan etos kerja aparatur masih sebagai birokrat yang feodalistik, di sisi lain penyediaan sumber daya aparatur dalam kelembagaan belum berdasarkan penilaian analisis jabatan dan beban tugas, sehingga dimungkinkan adanya ketidaksesuaian antara kapabilitas pegawai dengan tupoksi bidang yang diemban dan akhirnya mengakibatkan produktivitas aparatur tidak optimal.

2. Pendapatan Asli Daerah masih kecil

Keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan harus didukung dengan kemampuan keuangan dalam membiayai kegiatan pemerintahan. Salah satu komponen penting untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk itu, PAD senantiasa diusahakan untuk meningkat. Namun kondisi saat ini PAD Kota Sukabumi masih relatif kecil sehingga belum berperan besar dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kota. Beberapa hal yang menyebabkan rendahnya PAD Kota Sukabumi yaitu karena

ketersediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah relatif sedikit, belum optimalnya penggalian sumber-sumber pendapatan dan pengelolaan aset-aset daerah, selain itu belum efektifnya sistem pengelolaan keuangan daerah sehingga menimbulkan pemborosan, akhirnya menambah berat beban masyarakat untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kota.

3. Keamanan, Ketentraman dan ketertiban masyarakat serta partisipasi masyarakat yang belum optimal

Bersamaan dengan krisis ekonomi dan krisis pemerintahan pasca pemerintahan orde baru adalah meningkatnya gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta dipengaruhi pula oleh potensi konflik, ancaman tawuran dan unjuk rasa yang terjadi di tingkat nasional maupun propinsi. Implikasinya selain menimbulkan rasa takut, tidak aman dan kekhawatiran masyarakat, juga menyebabkan tidak efektifnya penyelenggaraan pemerintahan.

4. Masih Lemahnya Konsistensi dari Implementasi Penegakan Hukum dan Lemahnya Kesadaran Hukum Masyarakat

Belum pulihnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menyebabkan tidak efektifnya pemerintah dalam melakukan penegakan hukum, didukung pula oleh kurangnya kualitas dan kuantitas aparat penegak hukum yang ada saat ini, di sisi lain kurangnya kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat, sehingga sering permasalahan yang terjadi diselesaikan berdasarkan keinginan masyarakat sendiri tanpa memperhatikan hukum yang berlaku.

5. Budaya Politik Masyarakat yang Masih Rendah

Seiring dengan keberadaan orsospol, ormas dan organisasi kepentingan lainnya yang terus menjamur, maka dampak yang ada adalah suhu perpolitikan meningkat. Namun pada dasarnya tingkat pengetahuan masyarakat terhadap budaya politik masih kurang, begitu pula belum adanya pola, konsep dan metode pendidikan

politik yang baik dan benar karena masih berfikir untuk kepentingan partai politik masing-masing.

6. Kurangnya komunikasi antar dan sesama umat

Pembangunan keagamaan merupakan faktor yang sangat menunjang dalam membentuk moral dan kepribadian dalam pelaksanaan pembangunan secara menyeluruh baik dalam kehidupan bernegara maupun bermasyarakat. Adapun beberapa permasalahan pembangunan keagamaan yaitu masih terdapat perilaku sosial masyarakat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama, disamping itu perlu diwaspadai kemungkinan munculnya konflik antar umat beragama ataupun intern umat beragama itu sendiri. Permasalahan tersebut dikarenakan kurangnya komunikasi antar dan sesama umat agama akibat belum memperhatikan atau peduli terhadap norma agama yang hakiki.

2.4.2. Aspek Ekonomi

Tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Sukabumi dapat dicermati dari indikator Produk Domestik Regional Riil (PDRR) Kota Sukabumi. Pertumbuhan ekonomi Kota Sukabumi pada tahun 1996 sebesar 7,27 persen, mengalami penurunan pada Tahun 1997 menjadi 3,86 persen dan pada Tahun 1998 lebih terpuruk lagi menjadi minus 17,15 persen. Hal ini diakibatkan adanya krisis multidimensional yang berdampak pada perekonomian Kota Sukabumi.

Pertumbuhan ekonomi di Kota Sukabumi Tahun 1998 pada lapangan usaha pertanian sebesar minus 56,02 persen, perdagangan, hotel dan restoran minus 11,42 persen, serta keuangan dan persewaan sebesar minus 41,67 persen, penurunan pertumbuhan ekonomi ini akibat kurangnya aktivitas ekonomi yang diindikasikan turunnya produktivitas di sektor riil, meningkatnya jumlah pengangguran sehingga mencapai 20,46 persen pada Tahun 1998, kondisi ini diikuti pula dengan semakin

meningkatnya jumlah penduduk miskin (pra KS dan KS) sebesar 11.000 orang pada Tahun 1997 menjadi 16.000 orang pada Tahun 1998.

Perekonomian mulai meningkat lagi pada Tahun 1999 dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 3,20 persen, Tahun 2000 menjadi 4,82 persen, dan Tahun 2001 meningkat menjadi 5,02 persen dan kemudian pada Tahun 2002 meningkat menjadi sebesar 5,20 persen, peningkatan ini belum merata diseluruh lapangan usaha karena masih terdapat lapangan usaha yang mengalami penurunan atau pertumbuhan minus yaitu: lapangan usaha pertambangan sebesar minus 51,44 persen, lapangan usaha angkutan dan komunikasi minus 5,24 persen, lapangan usaha keuangan minus 20,60 persen dan lapangan usaha jasa-jasa minus 1,43 persen.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun hasilnya belum sepenuhnya sesuai dengan harapan, hal ini disebabkan adanya kendala-kendala yang dihadapi yaitu:

1. Kegiatan perekonomian yang masih tersentralisir

Kegiatan perdagangan dan jasa yang masih tersentralisir di wilayah tertentu menimbulkan ketidakjelasan dalam sistem distribusi barang sehingga kurang terjalinnya hubungan kemitraan antara pelaku ekonomi kecil dengan pelaku ekonomi menengah dan besar.

2. Pembinaan di bidang sektor informal belum optimal

Pedagang kaki lima, pedagang asongan, pengamen dan tukang becak merupakan sektor informal di Kota Sukabumi yang sedikit banyaknya mampu mengangkat pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, permasalahan yang dihadapi adalah keberadaan mereka yang tidak pada lokasi semestinya sehingga mengganggu kepentingan umum dan seringkali menimbulkan masalah-masalah sosial baru, seperti gangguan terhadap lalu lintas, sampah yang tidak terkendali dan perlawanan terhadap upaya penertiban.

3. Partisipasi usaha kecil, menengah, koperasi dan industri belum optimal

Kemampuan usaha kecil, menengah dan koperasi dalam pasar belum efektif sehingga tidak mampu bersaing dengan kompetitor besar atau asing. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan akses pasar, sumber-sumber permodalan, manajemen, serta terhambatnya pengembangan usaha kecil, menengah, koperasi dan industri, rendahnya promosi UKM, dan industri serta kualitas produksi yang tidak memenuhi standar kualitas mutu yang menyebabkan terhambatnya penerapan teknologi tepat guna.

4. Keterbatasan Sumber Daya Alam Pariwisata

Terbatasnya obyek wisata yang berkualitas menjadi kendala untuk menarik minat wisatawan baik wisata lokal/nusantara maupun wisatawan asing untuk berkunjung ke Kota Sukabumi. Permasalahan lain yang dihadapi adalah masih kurangnya promosi objek wisata, kurangnya mutu pelayanan pariwisata serta kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu mengoptimalkan Sumber Daya Alam (SDA) menjadi kendala internal di Kota Sukabumi.

5. Kurangnya Investor yang Menginvestasikan Modalnya

Rendahnya investor yang menanamkan modalnya disebabkan karena keterbatasan potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di Kota Sukabumi, kurangnya promosi potensi, belum jelasnya sistem investasi, rendahnya kualitas prasarana jalan dan terbatasnya jaringan jalan yang ada di Kota Sukabumi.

6. Rendahnya Daya Beli Masyarakat

Walaupun pendapatan per kapita masyarakat Kota Sukabumi dari tahun ke tahun menunjukkan kenaikan yang cukup tinggi, namun demikian hal ini tidak mencerminkan adanya kenaikan daya beli masyarakat.

7. Menurunnya Produktivitas Di Bidang Pertanian

Adanya perubahan fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian menyebabkan hasil produksi pertanian semakin menurun. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil dalam pengetahuan teknologi pertanian serta kurangnya minat kerja di lapangan pertanian terutama angkatan kerja baru menjadi kendala yang dihadapi pemerintah kota.

2.4.3 Aspek Sosial Budaya

Pembangunan bidang sosial budaya merupakan bagian integral dari pembangunan daerah yang pada akhirnya bermuara kepada peningkatan taraf hidup masyarakat, yang meliputi pendidikan, kebudayaan, kependudukan, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga sejahtera, ketenagakerjaan, kesehatan, kesejahteraan sosial, pemuda dan olahraga.

Perkembangan jumlah penduduk Kota Sukabumi yang terus meningkat, apabila tidak dikendalikan dengan seksama dapat menimbulkan permasalahan dikemudian hari yakni dengan semakin padatnya jumlah penduduk. Apalagi pada siang hari jumlah penduduk Kota Sukabumi dapat meningkat menjadi dua kali lipat, hal ini akan berdampak pada munculnya berbagai permasalahan sosial seperti kekumuhan dan kerawanan sosial.

Salah satu bidang yang berkaitan dengan kenaikan jumlah penduduk adalah bidang ketenagakerjaan, karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Adapun beberapa kendala yang dirasakan dalam aspek sosial budaya diantaranya adalah:

1. Terbatasnya kesempatan kerja di Kota Sukabumi.

Permasalahan yang dirasakan setelah terjadinya krisis moneter adalah semakin banyaknya pelaku ekonomi yang terpuruk yang pada akhirnya berdampak terhadap tingkat pengangguran yang terus

meningkat. Salah satu dilema yang sedang dihadapi oleh pemerintah Kota Sukabumi saat ini adalah terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia, sementara di sisi lain pemerintah kota dihadapkan pada jumlah angkatan kerja yang terus bertambah dengan tidak diimbangi oleh kemampuan (*skill*) tenaga kerja, sehingga menyebabkan banyak tenaga kerja yang bersedia bekerja menerima upah di bawah UMR.

2. Kurangnya kemampuan pelayanan dan penyediaan sarana prasarana Kesehatan

Permasalahan dalam bidang kesehatan adalah rendahnya kualitas pelayanan kesehatan yang diakibatkan keterbatasan sarana dan prasarana kesehatan seperti terbatasnya ruang perawatan dan peralatan kedokteran dalam menangani pasien, serta didukung pula oleh etos kerja pekerja kesehatan yang kurang profesional, sehingga masih banyak penduduk Kota Sukabumi yang berobat ke luar kota.

3. Rendahnya Kemampuan Masyarakat untuk Melanjutkan Pendidikan Ke Jenjang Yang lebih Tinggi

Berdasarkan data yang ada permasalahan pendidikan di Kota Sukabumi adalah berkaitan dengan tingginya angka putus sekolah sehingga tidak dapat melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Hal ini dikarenakan masih rendahnya kemampuan masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya sehingga mengakibatkan terhambatnya program penuntasan wajib belajar 9 tahun yang digulirkan Pemerintah Kota. Rendahnya kemampuan masyarakat ini berimplikasi pula pada aksesibilitas warga kota dalam memperoleh layanan pendidikan.

4. Rendahnya Keberdayaan dan Pengakuan Kebudayaan dan Kepemudaan

Permasalahan dalam pembangunan kebudayaan di Kota Sukabumi yaitu masih banyak aset-aset budaya bersejarah yang sampai dengan saat ini masih memprihatinkan kondisinya, begitupun dengan seni

yang masih kurang mendapatkan perhatian terutama masih banyak kreativitas para seniman yang belum tersalurkan sebagaimana mestinya.

Permasalahan pembangunan pemuda yaitu masih banyak dijumpai kasus-kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan Napza, perkelahian antar pelajar, perilaku seksual yang menyimpang, serta tindak kriminal. Permasalahan olahraga yaitu masih kurangnya pembinaan terhadap berbagai jenis cabang olahraga. Disamping itu budaya olahraga belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat sehingga kurang mendorong semangat berprestasi olahraga baik di tingkat regional, nasional maupun internasional.

5. Degradasi moral dan sosial masyarakat

Berbagai program kegiatan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Sukabumi dalam rangka mengeliminir berbagai permasalahan akibat krisis multidimensi yang terjadi, namun dampak yang diharapkan terhadap kesejahteraan masyarakat belum terlihat jelas keberhasilannya. Terlihat dari jumlah penduduk miskin dan angka pengangguran di Kota Sukabumi masih cukup tinggi, yang berdampak terhadap degradasi moral dan sosial seperti meningkatnya kriminalitas dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

6. Peran aktif kelembagaan masyarakat yang belum optimal

Permasalahan dalam pemberdayaan masyarakat adalah belum optimalnya peran serta dan dukungan masyarakat sebagai akibat pelaksanaan pemerintahan yang sentralistik pada masa lalu, serta didukung oleh belum mandirinya keberadaan pranata-pranata sosial masyarakat.

7. Pemberdayaan Perempuan

Masih kurangnya peran dari gender diberbagai pembangunan, dikarenakan Sumber Daya Manusia perempuan relatif masih terbatas.

2.4.4 Aspek Tata Ruang dan Infrastruktur Kota

Pembangunan kota perlu dilakukan, namun dalam pelaksanaannya tidak sepenuhnya sesuai dengan rencana sehingga terjadi penyimpangan yang sulit dikendalikan. Semakin besar proporsi pembangunan kota yang dilaksanakan oleh masyarakat semakin besar pula kemungkinan terjadi penyimpangannya, karena kebutuhan masyarakat sangat dinamis atau selalu berubah sehingga muncul kebutuhan-kebutuhan baru yang tidak terakomodasi dalam pembangunan yang ada. Kondisi ini bila tidak segera diantisipasi secara cepat, maka akan mempengaruhi proses pengendalian tata ruang kota yang semakin berkembang dan kurang terkendali, terlebih lagi, dengan adanya perluasan jumlah kecamatan.

Berdasarkan paparan di atas dapat dirumuskan berbagai kendala yang dihadapi dalam aspek tata ruang dan infrastruktur di kota, adalah sebagai berikut:

1. Penataan ruang yang belum efektif memenuhi dinamika kebutuhan masyarakat

Penataan Ruang bertujuan untuk memberi arah bagi pembangunan ruang kota sesuai rencana tata ruang wilayah, serta untuk memanfaatkan ruang bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Permasalahan dalam penataan ruang selain karena tata ruang masih bersifat abstrak juga karena adanya kecenderungan egoisme sektor, sehingga penataan ruang yang dilakukan bersifat birokratis.

2. Lalu Lintas dan Transportasi Umum yang Belum Memadai

Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang tidak diimbangi dengan pertumbuhan panjang dan ruas jalan, berakibat pada meningkatnya kepadatan lalu lintas yang akhirnya menimbulkan kemacetan. Intensitas kendaraan yang terlalu banyak menuju pusat kota menimbulkan kemacetan, keadaan lalu lintas semakin parah karena kondisi angkutan umum yang buruk dan tidak tertib, yang menyebabkan penggunaan kendaraan pribadi menjadi pilihan sebagian

warga kota, selain itu pula manajemen lalu lintas tidak optimal karena perbandingan jumlah kendaraan dan fasilitas jalan (termasuk terminal) yang tidak berimbang.

3. Kuantitas dan Kontinuitas Air Bersih yang terbatas

Pelayanan air minum yang memenuhi persyaratan kesehatan merupakan salah satu jasa pelayanan yang harus diselenggarakan oleh pemerintah kota. Pada aspek ini, pelayanan belum optimal, terlihat dari penurunan kualitas, kuantitas dan kontinuitas air yang dirasakan hampir sepanjang tahun.

4. Sistem drainase dan saluran pembuangan air limbah (sewerage) yang belum baik.

Sistem drainase merupakan salah satu prasarana kota yang sangat penting untuk mengatur aliran air hujan serta untuk mencegah timbulnya banjir. Kondisi saat ini sistem jaringan drainase di Kota Sukabumi masih belum terencana dengan baik. Hal ini terlihat dengan tidak berfungsinya sistem jaringan drainase secara baik serta tidak kontinunya jaringan yang ada di wilayah perkotaan. Selain itu terdapat beberapa jaringan jalan dan permukiman di Kota Sukabumi yang tidak terlayani jaringan drainase tersebut. Kondisi ini sering menimbulkan genangan pada beberapa lokasi apabila turun hujan. Air limbah (air kotor) merupakan salah satu bentuk dari sampah yang dihasilkan dari berbagai kegiatan penduduk di Kota Sukabumi. Air limbah tersebut berasal dari sisa kegiatan rumah tangga, komersial, perkantoran, industri dan lain-lain.

5. Perumahan dan penanganan daerah kumuh yang belum optimal

Besarnya jumlah penduduk yang bermukim pada lahan yang terbatas menjadi akar masalah perumahan. Kondisi ekonomi yang lemah dari sebagian besar warga kota menyebabkan ketidakmampuan mereka untuk memiliki lahan dan perumahan yang layak. Jumlah penduduk yang besar telah melampaui daya dukung kota dalam menyediakan

perumahan yang layak bagi penduduk. Akibatnya, penataan menjadi sulit dilakukan. Munculnya kawasan kumuh, dan banyaknya rumah tangga yang tinggal di bantaran sungai, menjadi tidak terhindarkan. Banyaknya bangunan dan perumahan menyebabkan kemampuan tanah dalam menyerap air menjadi sangat berkurang.

6. Penurunan Kualitas Lingkungan

Lingkungan merupakan kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia dalam melakukan suatu kegiatan. Pembangunan dalam rangka menggairahkan perekonomian Kota Sukabumi membawa dampak yaitu penurunan kualitas lingkungan, selain itu pertambahan penduduk yang terus meningkat mengakibatkan adanya peningkatan dalam pemenuhan kebutuhan hidup yang akhirnya akan menjadi beban lingkungan sebagai penerima limbah/sampah kegiatan masyarakat. Oleh karena itu, upaya preventif dalam pengendalian lingkungan hidup harus terus dikembangkan sehingga dapat mengantisipasi terjadinya kerusakan/pencemaran lingkungan hidup.